

Laporan Kesaksian Publik

Dalam semangat tradisi Reformasi yang menekankan pemeriksaan diri yang berkelanjutan sesuai dengan Firman Allah, serta panggilan untuk turut serta dalam menilik apa yang Allah katakan kepada kita dan apa yang dituntutnya dari kita pada waktu dan tempat tertentu ini, Komite Eksekutif WCRC menunjuk Komite Inti Kesaksian Publik untuk mengembangkan metodologi dan proses yang memfasilitasi penyusunan Laporan Kesaksian Publik untuk Sidang Raya 2025. Melalui proses sepanjang tahun, isu-isu mendesak dan keprihatinan diterima dari seluruh keluarga Reformed dan mitra ekumenis kami. Isu-isu ini dikumpulkan dan diteruskan dari satu kelompok "awan saksi" ke kelompok lain, yaitu Komite Kesaksian Publik (*Public Witness Committee/PWC*) yang ditunjuk pada Sidang Raya ke-27 (2025) di Chiang Mai.

Selama Sidang Raya, PWC, melanjutkan dalam semangat mendengarkan dan menilik, mengundang permohonan tambahan melalui satu sidang publik dan secara tertulis. Pengajuan baik secara publik maupun lisan, serta dari percakapan di berbagai acara pada Sidang Raya ke-27, mempertajam, mengklarifikasi, memberikan wawasan baru, dan masukan tambahan. Komite bekerja dengan hati-hati dan sensitif untuk mendiskusikan isu-isu mendesak yang muncul dari konteks gereja-gereja, wilayah regional, dan mitra ekumenis.

Sesuai dengan empat kata kerja Persidangan—Menilik, Mengakui, Menyaksikan, dan Diperbarui—dan lima tindakan programatik Persidangan (P1–P5), laporan ini mengumpulkan dan menyajikan usulan yang diterima dari gereja-gereja anggota dan badan-badan regional. Usulan-usulan ini mencerminkan realitas hidup dan keyakinan profetik keluarga Reformed di setiap wilayah. Dipandu oleh agenda yang belum selesai dari Reformasi dan terinspirasi oleh Konfesi Belhar dan Accra serta Sidang Raya Leipzig, Komite Kesaksian Publik menyajikan laporan ini sebagai tindakan penilikan bersama—mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan melalui gereja-gereja dan mitra Persekutuan.

Setiap masukan mewakili seruan keadilan dan kesaksian dari dalam kehidupan gereja-gereja anggota dan persekutuan mitra kita. Komite Kesaksian Publik telah menyatukan mereka dengan cara yang menghormati integritas mereka dalam proses penilikan kami yang berkelanjutan sembari menyoroti keterkaitan dari kekhawatiran-kekhawatiran mereka.

Keadilan untuk Ciptaan dan Rakyat Tergusur: Seruan Bersama dari Bumi dan Pinggiran

Terkait pengajuan tentang keadilan ekologis, migrasi paksa, dan kesaksian teologis dan kontekstual wilayah Pasifik, komite mengakui hubungan yang mendalam antara kekhawatiran ini dan landasan teologis bersama tentang keadilan bagi ciptaan dan rakyat tergusur. Komite menegaskan bahwa keruntuhan ekologis, migrasi paksa, ketidakadilan nuklir, ketidakadilan ekonomi, dan perjuangan untuk penentuan nasib sendiri bukanlah krisis terisolasi, tetapi manifestasi dari satu hubungan yang rusak—perjanjian manusia dengan Allah, sesama, dan ciptaan. Sebagai tanggapan, komite mengajukan pernyataan terpadu berikut, "*Keadilan bagi Ciptaan dan Masyarakat yang Tergusur: Seruan Bersama dari Bumi dan Pinggiran.*" Pernyataan ini menggabungkan wawasan teologis dan seruan spesifik dari keempat masukan, mengartikulasikan kesaksian bersatu kepada Persidangan untuk tindakan dan penilikan.

A. Keadilan Ekologis dan Iklim — Persekutuan dengan Ciptaan

Sidang Raya ke-27 *World Communion of Reformed Churches* (WCRC) berkumpul di Chiang Mai pada tahun 2025 di bawah bimbingan Roh Kudus, mendengarkan jeritan ciptaan dan suara

mereka yang menderita di tengah bencana ekologi, pengungsian, kontaminasi nuklir, dan penindasan kolonial yang terus berlanjut.

Kami menegaskan bahwa realitas-realitas ini adalah tanda-tanda yang saling terhubung dari hubungan manusia yang telah rusak dengan Allah, dengan sesama, dan dengan ciptaan. Mereka memanggil kami untuk bertobat, berbalik arah, dan berkomitmen kembali pada misi Allah akan keadilan, damai, dan integritas ciptaan.

Persidangan Menegaskan

- Bumi adalah milik Tuhan dan segala isinya (Mzm 24:1); panggilan umat manusia adalah merawat oikos Allah — rumah tangga kehidupan.
- Perubahan iklim, migrasi paksa, kontaminasi nuklir, dan eksploitasi kolonial yang terus berlanjut mengungkap dosa struktural yang mendalam dalam sistem ekonomi dan politik.
- Injil Yesus Kristus memanggil Gereja untuk bersolidaritas dengan yang paling rentan — masyarakat adat, perempuan, kaum muda, dan komunitas yang terpaksa mengungsi.
- Teologi kontekstual seperti visi Pasifik *Do Kamo* (kemanusiaan autentik dalam persekutuan dan pembebasan) mengungkapkan bagaimana Roh Kudus tengah memperbarui bumi melalui komunitas iman dan perlawanan.

Persidangan Meratapi

- Kerusakan ciptaan akibat keserakahan dan ekonomi ekstraktif.
- Dampak yang tidak proporsional dari krisis iklim terhadap komunitas miskin di Malawi, Madagaskar, Mozambik, Afrika Selatan, dan pulau-pulau Pasifik.
- Hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem yang mengancam kehidupan itu sendiri.
- Munculnya ideologi ekofasis dan nasionalis yang menolak tanggung jawab global.
- Skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pengungsian paksa — lebih dari 117 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
- Militerisasi perbatasan dan kebijakan yang mendegradasi martabat migran dan pengungsi.
- Kolonisasi yang terus berlanjut dan penolakan hak menentukan nasib sendiri di Hawai'i, Ma'ohi Nui, Kanaky, Papua Barat, dan Aotearoa.

Sidang Raya dipanggil untuk:

A. Keadilan Ekologis dan Iklim

1. Meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku untuk mencegah bencana ekologi.
2. Bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap tuntutan iklim.
3. Mendorong transisi cepat dari bahan bakar fosil ke ekonomi berkelanjutan.
4. Berpartisipasi dalam proses internasional seperti COP dan membagikan hasilnya dengan gereja-gereja anggota.
5. Mendasarkan advokasi pada bukti ilmiah dan penilikan berdasar iman untuk perawatan bersama *oikos*.

B. Orang yang Berpindah dan Migrasi Paksa - Persekutuan sebagai Hospitalitas Bersama

Dalam proses tanggapan Persekutuan terhadap pengungsian paksa dalam praktik *hospitalitas bersama*, kami bertujuan untuk menangani akar penyebab yang saling terkait sambil melindungi martabat dan hak-hak semua orang yang terpaksa mengungsi.

Persidangan menyerukan:

1. Mendidik komunitas mereka tentang akar penyebab pengungsian paksa — termasuk perang, ketidakadilan ekonomi, perubahan iklim, dan diskriminasi.
2. Berkolaborasi melalui webinar dan kunjungan solidaritas yang membahas pengungsian.
3. Mendorong kebijakan migrasi yang adil, yang menghormati martabat manusia.
4. Mendukung inisiatif akar rumput yang membangun mata pencaharian berkelanjutan dan menentang militerisme.
5. Mendorong sanksi dan langkah pertanggungjawaban yang menargetkan pelaku penindasan daripada seluruh populasi.
6. Melibatkan kaum muda dan jaringan antar generasi untuk membangun jembatan solidaritas dan refleksi teologis tentang migrasi dan rasa memiliki.

C. Kesaksian Pasifik dan Solidaritas Regional

Masukan ini menyaksikan teologi kehidupan di mana kemakmuran manusia tidak terpisahkan dari kesejahteraan lautan dan pulau-pulau. Ia menyerukan kepada Persekutuan global untuk mengakui bahwa *kita memiliki persekutuan ketika kita menerima tempat kita sebagai bagian dari ciptaan, bukan di atasnya*. Persidangan menegaskan kepemimpinan teologis dan moral gereja-gereja Pasifik melalui visi *Do Kamo* — panggilan menuju kemanusiaan yang autentik, pembebasan, dan persekutuan. Persidangan mendukung Deklarasi Samudra Perdamaian (*Ocean of Peace Declaration*) sebagai alternatif yang berakar pada iman terhadap keamanan yang militeristik, didasarkan pada konsep-konsep Pasifik *filemu*, *melino*, dan *sautu*, bersama dengan *shalom* Alkitab.

Sidang Raya meminta:

1. Dukung upaya Pasifik untuk dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri sebagai ekspresi iman, keadilan, dan integritas ciptaan.
2. Perkuat kepemimpinan kaum muda dan perempuan melalui mentoring terstruktur, partisipasi dalam tata kelola, dan pembinaan ekumenis, terutama dalam inisiatif keadilan iklim dan ketahanan.
3. Integrasikan teologi ekokomunal ke dalam pendidikan teologis dan pembinaan pastoral.
4. Dukung komitmen iklim wilayah Pasifik, termasuk: moratorium penambangan laut dalam dan penarikan investasi dari bahan bakar fosil; pembentukan jaringan perawatan trauma untuk komunitas yang terdampak iklim; respons yang berakar pada budaya terhadap tantangan kesehatan dan kesejahteraan, termasuk inklusi disabilitas, pencegahan penyakit tidak menular, dan perawatan pastoral bagi mereka yang terdampak krisis narkoba atau kecanduan.
5. Tangani warisan nuklir Pasifik dan keadilan lingkungan:
 - Berdiri bersama komunitas yang terdampak uji coba nuklir di Republik Kepulauan Marshall dan Polinesia Perancis, di mana ledakan masa lalu dan ancaman saat ini—seperti kerusakan Kubah Runit—terus mengancam kehidupan dan ciptaan.
 - Melakukan advokasi, bekerja sama dengan badan-badan ekumenis, untuk meminta pertanggungjawaban dari Amerika Serikat dan Perancis, termasuk permintaan maaf resmi, kompensasi yang adil, dan dukungan teknis untuk pemulihan lingkungan.
 - Mendorong pengungkapan kebenaran, peningkatan kesadaran, dan rekonsiliasi di antara komunitas yang terdampak, dipandu oleh kepedulian terhadap ciptaan, kebenaran, dan pertanggungjawaban.
 - Menegaskan bahwa keadilan nuklir merupakan bagian integral dari keadilan ekologi dan iklim di seluruh Benua Pasifik Biru.

Keadilan untuk Semua Tubuh

Masalah yang diangkat terkait keadilan untuk semua tubuh, termasuk isu seputar seksualitas manusia dan hak reproduksi yang berkaitan dengan perlindungan orang dan komunitas LGBTQ+. Mengingat kita tidak sependapat mengenai seksualitas manusia, kami mengajukan usulan berikut:

Tambahkan kalimat untuk mengakui keragaman persekutuan

Seksualitas Manusia (*halaman 46-48 Leipzig sebagai catatan kaki*)

Kami menegaskan bahwa semua individu diciptakan menurut gambar Allah dan oleh karena itu layak mendapatkan cinta, penghormatan, dan martabat yang sama tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka. Kami mengecam diskriminasi, kekerasan, dan pengucilan sosial terhadap orang-orang LGBTQIA+ dan yang tidak mengikuti norma gender, dengan menyoroti bahwa interpretasi teks suci oleh beberapa komunitas agama digunakan untuk membenarkan ketakutan dan perlakuan buruk. Kami mengakui bahwa setidaknya 67 negara masih mengkriminalisasi hubungan sesama jenis—seringkali melalui undang-undang yang kabur dari zaman kolonial—dan sembilan negara mengkriminalisasi ekspresi gender tertentu. Meskipun ada undang-undang perlindungan di beberapa tempat, prasangka dan kekerasan tetap berlanjut, dan kejahatan kebencian terhadap individu LGBTQIA+ tetap menjadi perhatian serius.

Kami mengakui peran historis Gereja dalam mempertahankan praktik-praktik penindasan seperti perbudakan, kolonialisme, dan norma-norma seksual yang ketat, dan kami mendesak pertobatan, refleksi kolektif, dan pemulihan. Kami mendesak Gereja untuk menjadi teladan kasih dan keadilan Allah dengan menolak kebijakan-kebijakan agama dan sekuler yang merugikan.

Langkah krusial dan konstruktif dalam proses ini adalah terlibat dalam dialog yang penuh doa dan inklusif yang mendengarkan suara individu LGBTQIA+. Dengan mengatasi warisan ini dan menantang peran gender yang kaku serta dominasi laki-laki, komunitas keagamaan dapat menjadi saksi dan memfasilitasi lingkungan yang lebih aman serta mempromosikan hak asasi manusia, memungkinkan semua individu untuk mengalami kasih Allah yang melimpah dan keutuhan hidup.

Sidang Raya dipanggil untuk:

1. Merayakan keragaman ciptaan Allah, termasuk anugerah kehidupan dari cinta dan seksualitas manusia
2. Menyaksikan Injil Kristus tentang cinta dan inklusi, secara eksplisit menolak upaya untuk menstigmatisasi, menghukum, atau mengucilkan individu berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka. Kami secara khusus menyoroti pengucilan dari kehidupan dan kepemimpinan gereja.
3. Terlibat dalam proses studi dan konsultasi untuk memungkinkan anggota mendalami pemahaman tentang implikasi sosial dan teologis dari orientasi seksual dan ekspresi gender, mengenali bagaimana Allah memanggil Gereja untuk memberikan kesaksian profetik dalam hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan gender, serta bekerja menuju konsensus untuk advokasi kebijakan publik di masa depan. Konsultasi semacam itu harus melibatkan orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender yang beragam.

Hak Reproduksi: Masalah Keadilan untuk Semua Tubuh

Komite mengakui bahwa pertanyaan tentang hak reproduksi memunculkan perspektif teologis dan budaya yang beragam di Persekutuan kita. Kami menyertakan masukan ini sebagai bagian dari refleksi bersama kita tentang martabat hidup, keadilan gender, dan integritas tubuh, mempercayai Roh Kudus untuk memandu Persekutuan menuju pemahaman yang lebih dalam. Kelimpahan hidup yang dijanjikan Allah (Yohanes 10:10) mencakup martabat, keamanan, dan kesejahteraan setiap tubuh. Keadilan reproduksi tidak berdiri sendiri tetapi terhubung dengan semua aspek iman dan kehidupan. Hak-hak ini beririsan dengan isu-isu gender, ras, kelas, dan agama, menjadikan kebebasan reproduksi sebagai landasan kesetaraan dan martabat. Namun, sistem patriarkal, kolonial, ekonomi, dan berbagai bentuk kontrol sosial terus membatasi martabat dan kewarganegaraan perempuan, membentuk undang-undang yang membahayakan orang tua yang melahirkan, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang terbatas.

Dalam semangat *persekutuan sebagai keadilan*, gereja dipanggil untuk menentang segala kuasa yang merendahkan kehidupan. Penyembuhan Yesus terhadap perempuan yang mengalami pendarahan (Markus 5) mengungkapkan kepedulian Allah terhadap kesempurnaan dan martabat manusia melampaui hukum atau adat istiadat. Membatasi otonomi tubuh adalah upaya untuk menyamarkan *citra Allah (imago Dei)* dalam diri setiap orang. Teks ini dapat dipandang sebagai teks pencerahan bagi Hak Reproduksi, karena Yesus melanggar hukum negara yang telah diritualkan untuk merawat perempuan yang menyentuh jubah-Nya. Menolak kemampuan tubuh yang melahirkan untuk memilih dan memiliki otonomi melalui pembatasan hukum, secara teologis, adalah upaya langsung untuk melepaskan tubuh dari ciptaan Allah. Jika imago Dei hidup dalam setiap orang sebagai jejak cinta Allah di dunia, maka pembatasan tubuh-tubuh tersebut adalah upaya untuk mengikat Allah. Sepanjang teks Alkitab, Allah menekankan pentingnya pilihan dan berbagi sumber daya sebagai hal esensial untuk kemakmuran kita. Merawat satu sama lain dan mencintai tetangga kita seperti mencintai diri sendiri adalah inti seluruh teks Alkitab.

Hak reproduksi merupakan dimensi esensial dari integritas kehidupan manusia. Dalam kerangka yang lebih luas dari keadilan reproduksi, hak-hak ini menegaskan kesucian otonomi tubuh dan kesejahteraan keluarga serta komunitas. Akses terbatas terhadap kontrasepsi, aborsi yang aman, pendidikan, dan informasi akurat, serta kekurangan sumber daya kesehatan dan penolakan perawatan selama kehamilan dan pasca melahirkan, menyebabkan kematian yang seharusnya dapat dicegah. Faktor-faktor ini memperkuat ketidakadilan sistemik dalam kesehatan reproduksi.

Sidang Raya dipanggil untuk:

1. Menyertakan hak reproduksi dalam pekerjaan keadilan gender Persekutuan, dengan memperhatikan gereja-gereja yang memerlukan sumber daya dan dukungan kontekstual.
2. Mendorong refleksi teologis dan perawatan pastoral yang menegaskan kesucian pilihan, martabat, dan kesejahteraan komunitas.

Seruan ini mencerminkan komitmen Persidangan untuk menilik, mengakui, bersaksi, dan diperbarui melalui komunitas yang mengutamakan cinta, martabat, dan kemakmuran hidup.

Kekerasan Seksual di Gereja-Gereja Kita

Kita hidup di zaman di mana kekuasaan digunakan untuk menindas dan mengeksploitasi. Kita mengakui bahwa gereja-gereja kita juga merupakan institusi kekuasaan dan bahwa kita tidak kebal terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Di masa lalu dan hingga saat ini, kekuasaan telah disalahgunakan untuk mendominasi dan melanggar anggota komunitas kita, yang terwujud dalam bentuk penyalahgunaan—seksual, spiritual, dan dalam banyak bentuk lain—dengan konsekuensi yang tak terkatakan bagi para korban. Kita mengakui kegagalan kita untuk mendengarkan dan ketidaktahuan kami yang terus-menerus, dan kita bertanggung jawab atas keterlibatan kita. Kita menyesali bahwa kesiapan gereja-gereja kita untuk perjalanan refleksi diri dan perubahan yang bermakna masih kurang.

Kami menyerukan kepada WCRC

1. Untuk menciptakan ruang untuk berbagi dan belajar satu sama lain mengenai penggunaan kekuasaan yang kritis, kegagalan historis, dan pencegahan pelecehan.
2. Untuk mendampingi semua gereja anggota dalam mengembangkan kebijakan pencegahan pelecehan seksual, pelatihan pencegahan, dan sistem dukungan independen bagi korban pelecehan seksual.

Masyarakat Adat

PWC menegaskan keprihatinan mendalam yang diungkapkan dalam pengajuan ini terkait dampak berkelanjutan dari kolonialisme dan penolakan hak-hak masyarakat adat atas tanah, keadilan, dan otonomi. Isu-isu ini menjadi inti dari kesaksian Persekutuan terhadap keadilan dan hubungan yang benar dengan ciptaan dan sesama.

Secara historis, hak-hak masyarakat adat telah dilanggar melalui pencurian tanah dan sistem kolonial yang represif. Banyak gereja terdiri sepenuhnya dari masyarakat adat, dan isu-isu pemulihan, ganti rugi, dan rekonsiliasi tetap belum terselesaikan. Secara global, pelanggaran hak serupa dialami oleh populasi penduduk asli, terutama di wilayah seperti Amerika Utara, Karibia, Pasifik, dan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Masyarakat adat, yang sudah menghadapi diskriminasi, terdampak secara tidak proporsional oleh krisis iklim. Dampak kolonialisme yang berkepanjangan terus membatasi hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia, menjadikannya

isu hak asasi manusia dan ekonomi yang signifikan. Di banyak bagian dunia, atas nama pembangunan dan kemajuan, tanah masyarakat adat dirampas oleh korporasi transnasional demi keuntungan, dan masyarakat adat dipaksa pindah. Kami khususnya mendengarkan kisah masyarakat adat yang disebut Adivasi, atau penduduk asli India, yang berjuang untuk hak-hak sah mereka atas air, hutan, dan tanah.

Dalam iman Kristen, kasih adalah panggilan utama dan sentral. Yesus menekankan pentingnya mencintai Allah dan sesama, seperti yang tercantum dalam Injil Matius dan Perumpamaan tentang Orang Samaria yang Baik Hati. Tindakan yang tidak mencerminkan kasih Allah tidak memenuhi harapan ini. Membatasi hak dan pengalaman orang lain berdasarkan tradisi agama mereka merupakan pelanggaran terhadap perintah untuk saling mengasihi. Gereja dipanggil untuk mewujudkan kasih dan keadilan Allah dengan menangani ketidakadilan historis dan berkelanjutan terhadap masyarakat adat serta memperjuangkan hak dan martabat mereka.

Sidang Raya dipanggil untuk:

1. Mengadopsi pernyataan kebijakan yang menyerukan pembayaran ganti rugi ekonomi kepada masyarakat adat, termasuk pengembalian tanah yang diambil dari masyarakat asli.
2. Mengajak untuk mengangkat isu-isu hak masyarakat adat di dalam gereja-gereja anggota WCRC.
3. Mengembangkan materi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran di seluruh denominasi dan gereja-gereja anggota tentang diskriminasi dan penindasan yang terus menerus dialami oleh masyarakat adat.

Orang-orang Keturunan Afrika - Pengakuan, Keadilan, dan Pengembangan

Dalam rangka panggilan Persidangan untuk memajukan persekutuan yang adil dan mengejar ganti rugi atas warisan perbudakan dan rasisme, komite menerima pengajuan mengenai situasi orang-orang keturunan Afrika. Konfesi Accra mengakui tantangan-tantangan tersebut, terutama akibat pengalaman di benteng budak Cape Coast. Pertemuan tahun 2007 pada peringatan 200 tahun berakhirnya perbudakan juga mengundang keluarga ekumenis untuk memperhatikan dampak warisan tersebut. Sudah saatnya keluarga Reformasi memberikan perhatian khusus pada realitas warisan tersebut.

Warisan berkelanjutan dari perdagangan budak Trans-Atlantik telah diakui oleh mitra ekumenis dan masyarakat sipil global selama puluhan tahun. Konferensi Durban pada tahun 2010 dan percakapan pendahulunya menyoroti pentingnya mengakui dampak perbudakan terhadap orang-orang keturunan Afrika.

PBB mendirikan Dekade Internasional untuk Orang-orang Keturunan Afrika untuk mengakui kontribusi esensial mereka di seluruh dunia, mempromosikan keadilan sosial dan inklusif, menghilangkan rasisme, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan tema "Pengakuan, Keadilan, dan Pengembangan", Dekade ini dan Forum Permanen Orang-orang Keturunan Afrika yang dihasilkannya menyediakan platform untuk konsultasi dan tindakan guna meningkatkan keamanan, kualitas hidup, dan mata pencaharian orang-orang keturunan Afrika sambil menghadapi pengaruh berkelanjutan dari sistem seperti supremasi kulit putih dan struktur sosial diskriminatif.

Meskipun ada kemajuan melalui inisiatif-inisiatif, orang-orang keturunan Afrika tetap termasuk dalam kelompok yang paling terpinggirkan di dunia. Mereka menghadapi hambatan yang persisten dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial, serta profil rasial, kekerasan polisi, dan diskriminasi ganda berdasarkan gender, usia, agama, atau

faktor lain. Tindakan diskriminatif dan manipulatif terhadap orang-orang Afrika, termasuk eksploitasi berabad-abad dan pengucilan sosial, telah meninggalkan luka yang mendalam pada orang-orang Afrika.

Sidang Raya dipanggil untuk:

1. Menuntut penghentian serangan rasialis dan tindakan kekerasan terhadap individu, gereja, dan komunitas.
2. Mengenali bahwa serangan kekerasan terhadap dan penahanan individu kulit hitam dimungkinkan karena rasisme yang terinstitusionalisasi dalam struktur, sistem, dan proses di berbagai negara.
3. Berkomitmen untuk membongkar ideologi supremasi kulit putih dan mitos keunggulan rasial, serta mendukung inisiatif reparasi.
4. Mengutamakan keterlibatan dengan Forum Permanen Orang-orang Keturunan Afrika, termasuk partisipasi aktif dalam acara sampingan, dan pengajuan pengalaman tertulis dari gereja-gereja anggota dan badan-badan akar rumput.
5. Pastikan prioritas dan kegiatan Forum disampaikan kepada badan pengambilan keputusan WCRC yang relevan dan menjadi dasar untuk bidang advokasi Sidang Raya.

Mengatasi semua bentuk perbudakan

Sebagai kelanjutan dari seruan Persekutuan untuk reparasi dan penyembuhan atas ketidakadilan sejarah, gereja-gereja anggota mengajukan pernyataan tentang bentuk-bentuk perbudakan modern dan warisan.

Meskipun perbudakan telah secara resmi dihapuskan, warisannya tetap berlanjut melalui bentuk-bentuk rasialisme, ketidaksetaraan, dan eksploitasi baik secara pribadi maupun struktural. Bentuk-bentuk baru perbudakan tetap ada di seluruh dunia melalui perdagangan manusia, diskriminasi berdasarkan keturunan, dan kondisi kerja yang paksa atau berbahaya.

Kitab Suci menyerukan Gereja untuk menentang dan mengatasi segala hal yang memperbudak manusia dan ciptaan, bekerja menuju rekonsiliasi, pemulihan, dan pemulihan.

Sidang Raya dipanggil untuk

1. Mendukung dan mengukuhkan kerja sama dengan organisasi ekumenis lain seperti Dewan Gereja-Gereja Sedunia, Dewan Misi Sedunia, dan Federasi Lutheran Sedunia dalam mengatasi semua bentuk perbudakan dan warisannya yang terus berlanjut.
2. Mengajak gereja-gereja anggota untuk mendengarkan, bertindak, dan melihat bagaimana 'perbudakan' berperan dalam konteks mereka sendiri
3. Mengundang gereja-gereja anggota untuk bersahabat dan bersolidaritas dengan mereka yang terdampak oleh perbudakan dan warisannya yang terus berlanjut guna mengubah ketidakadilan, menyembuhkan kenangan, dan secara aktif terlibat dalam pelayanan pemulihan dan ganti rugi.

Solidaritas dengan orang Dalit - Menghapuskan diskriminasi berdasarkan kelahiran dan pekerjaan

Dalam Perjanjian untuk Keadilan (hal. 2) — demokrasi dan penghapusan ras dan kasta — komite menerima pengajuan yang mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap penindasan yang terus berlanjut terhadap orang Dalit.

Dahulu disebut "orang yang tak dapat disentuh," Dalit adalah mereka yang berada di luar sistem kasta di India. Selama berabad-abad, mereka telah dianiaya melalui sistem hierarki sosial berjenjang berdasarkan konsep kemurnian dan pencemaran. Ini adalah sistem diskriminasi berdasarkan pekerjaan dan keturunan. Penindasan ini terus berlanjut hingga hari ini melalui praktik-praktik pengucilan sosial, termasuk praktik-praktik ketidakbersentuhan dan kekerasan. Tentu saja, situasi perempuan Dalit bahkan lebih buruk. Sebagian besar umat Kristen di India adalah orang Dalit.

Sidang Raya diminta untuk:

1. Berdiri bersama orang Dalit dan Kristen Dalit serta perjuangan mereka untuk martabat dan pembebasan.
2. Mendorong emansipasi Dalit di forum internasional.
3. Mengadakan konsultasi yang mengumpulkan orang-orang yang tertindas karena alasan kasta, ras, pekerjaan, atau keturunan untuk berbagi pengalaman dan memperkuat solidaritas mutual di seluruh wilayah.

Keadilan untuk Semua dan Kebebasan serta Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Palestina

Di bawah seruan Persidangan untuk tetap teguh dalam kesaksian akan keadilan dan perdamaian, komite menerima pengajuan dari gereja-gereja anggota mengenai situasi yang terus berlanjut di Palestina dan Israel.

Meskipun gencatan senjata dan kerangka perdamaian baru-baru ini telah diberlakukan, rakyat Palestina terus mengalami penghancuran tanah, pengusiran, dehumanisasi, kekerasan, kehilangan nyawa, genosida, dan apartheid. Tindakan-tindakan ini melanggar hak-hak dasar mereka atas kebebasan, martabat, dan penentuan nasib sendiri. Gereja mengakui bahwa perdamaian yang sejati dan langgeng hanya dapat tercapai melalui keadilan, bukan dominasi, pendudukan, atau kekerasan.

Komunitas Kristen Palestina, bersama gereja-gereja dan organisasi keagamaan di seluruh wilayah, memainkan peran penting dalam kehidupan budaya, spiritual, dan kemanusiaan negara tersebut. Pada saat yang sama, pembunuhan sembarangan terhadap warga sipil dan penghancuran infrastruktur telah mempengaruhi orang-orang dari semua agama di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah.

Situasi ini tidak hanya memengaruhi Palestina tetapi juga Israel dan masyarakat serta budayanya, seperti yang terlihat dalam meningkatnya anti-Semitisme. Penyelesaian yang adil untuk Palestina, serupa dengan berakhirnya apartheid di Afrika Selatan, akan membebaskan baik Palestina maupun Israel. Penyalahgunaan teologi untuk membenarkan Zionisme dan kolonialisme memperburuk trauma antargenerasi Palestina dan Israel. Pembagian moral global saat ini, yang dibentuk oleh banyak negara dan Kristen yang gagal mematuhi nilai-nilai pasca-Perang Dunia II dan hukum internasional, memperparah krisis kemanusiaan di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon. Meskipun ada kecaman luas, kekuatan Barat terus mendukung Israel dengan bantuan militer dan senjata.

Gereja menyadari bahwa perdamaian yang sejati dan langgeng berasal dari keadilan, bukan hukum dan kekerasan. Presiden WCRC dalam pidatonya mengajak kita untuk "memecahkan rantai slogan" dan mengajak Persidangan untuk "berbicara secara profetik" bagi seluruh umat manusia. Gereja merujuk pada Kitab Suci, di mana seruan keadilan berakar pada Taurat dan tradisi nabi, dan ajaran Yesus menunjukkan jalan menuju keadilan. Alkitab Ibrani menggambarkan Allah sebagai Allah keadilan, berdiri bersama yang tertindas, dan menceritakan sejarah Israel di bawah kerajaan-kerajaan berturut-turut. Pelayanan Yesus, dilihat dalam konteks

perlawanan terhadap Kekaisaran, menekankan keadilan dan pada akhirnya mengarah pada penyaliban-Nya. Gereja dipanggil untuk menunjukkan komitmennya terhadap keadilan melalui pernyataan dan tindakan, mengikuti teladan Yesus.

Sidang Raya dipanggil untuk:

1. Mengukuhkan kembali deklarasi Sidang Raya di Leipzig, yang menegaskan bahwa "terkait dengan situasi ketidakadilan dan penderitaan yang ada di Palestina, serta seruan komunitas Kristen Palestina, integritas iman dan praktik Kristen berada di ujung tanduk."
2. Oleh karena itu, menyatakan bahwa penindasan yang terus-menerus terhadap rakyat Palestina, yang merampas kebebasan dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, adalah dosa terhadap Tuhan dan kemanusiaan.
3. Menolak Zionisme Kristen dalam segala bentuknya, yang didefinisikan oleh teolog Palestina Mitri Raheb, Zionisme Kristen adalah lobi Kristen yang mendukung kolonialisme pemukim Yahudi di tanah Palestina menggunakan konstruksi biblis/teologis dalam narasi besar, sambil mempertimbangkan aspek global. Definisi ini bukan berfokus pada diskursus biblis Zionis Kristen, yang dapat bervariasi secara signifikan dari literalis hingga teologi pasca-Holocaust, dari yang sangat konservatif hingga liberal. Faktanya, landasan Alkitab/teologis yang dianut oleh sebagian besar Zionis Kristen sangat samar dan didasarkan pada sedikit ayat Alkitab yang beragam. Penekanan definisi kami adalah pada aspek lobi Zionisme Kristen: bukan pada apa yang orang *percayai*, tetapi apa yang mereka *lakukan* berdasarkan keyakinan tersebut.
4. Akui dan nyatakan bahwa upaya untuk membenarkan penindasan secara Alkitabiah atau teologis merusak kebenaran dan keadilan Allah.
5. Tuntut agar Israel bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan resolusi PBB dan hukum internasional.
6. Serukan kepada komunitas internasional untuk mendukung rekonstruksi Gaza dan rehabilitasi rakyat Palestina, termasuk program perawatan trauma jangka panjang dan pemulihan, serta program kemanusiaan gereja-gereja anggota yang bekerja sama dengan mitra Palestina untuk mendukung upaya-upaya ini.
7. Bekerja menuju dan mendukung semua upaya untuk mempromosikan perdamaian yang adil dan rekonsiliasi bagi Palestina dan Israel serta di seluruh wilayah, termasuk bekerja sama dengan gereja-gereja anggota, mitra, dan organisasi ekumenis serta internasional lainnya.

Menolak Anti-Semitisme

Persidangan mengakui dan mengecam semua bentuk anti-Semitisme. Gereja memiliki sejarah panjang dan rumit dalam pengajaran dan penganiayaan anti-Yahudi — dari pengucilan dan penghinaan hingga kekerasan dan genosida. Kami mengakui bahwa anti-Semitisme telah dipertahankan melalui tafsir Alkitab dan teologi, dan kami bertobat atas dosa tersebut.

Anti-Semitisme masih berlanjut hingga hari ini melalui ujaran kebencian, teori konspirasi, dan serangan kekerasan terhadap komunitas Yahudi. Bentuk khusus telah muncul yang mencampuradukkan tindakan Negara Israel dengan tindakan orang Yahudi di mana pun, sehingga membahayakan seluruh komunitas.

Sidang Raya diminta untuk:

1. Menolak anti-Semitisme dalam segala bentuknya

2. Mendorong gereja-gereja anggota untuk terlibat dalam dialog antaragama yang mempromosikan pemahaman bersama, rasa hormat, dan komitmen bersama terhadap martabat manusia. dan
3. Serahkan kepada Komite Eksekutif segala pekerjaan strategis dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan dalam bidang ini

Nasionalisme Agama - Bertahan dalam Menyaksikan Injil Kristus yang Inklusif

Gereja-gereja anggota mengemukakan kekhawatiran tentang meningkatnya nasionalisme agama di beberapa konteks, di mana pemimpin politik dan gerakan memanfaatkan simbol-simbol Kristen dan retorika untuk melegitimasi eksklusif, kebencian, dan otoritarianisme.

Bertahan dalam kesaksian panggilan kita untuk persekutuan dan komitmen kita terhadap keadilan, kita menghadapi dalam beberapa konteks, misalnya di AS, peningkatan nasionalisme agama yang mengancam esensi kesaksian Kristen, baik dalam ucapan maupun tindakan. Beberapa otoritas mengklaim iman Kristen sambil menggambarkannya sebagai iman yang penuh kebencian, eksklusif, ketidakadilan, dan kekerasan.

Tren polarisasi global yang semakin meningkat juga menyebabkan marginalisasi dan diskriminasi yang semakin parah berdasarkan afiliasi agama, mengancam hak dan kebebasan minoritas agama. "Merek" eksklusivitas agama dan kebencian ini bertentangan dengan ekspresi iman yang penuh kasih, afirmatif, dan ramah yang berusaha diwujudkan oleh banyak tradisi, serta memicu kekerasan. Pemerintah otoriter yang berusaha membatasi kebebasan minoritas agama mempertahankan penindasan dan marginalisasi, memengaruhi individu, keluarga, dan komunitas yang tidak memiliki pengaruh politik. Dampak ini juga mencakup mereka yang mempraktikkan pluralisme agama atau mempertahankan identitas agama lebih dari satu.

Sidang Raya dipanggil untuk:

1. Mengukuhkan komitmen terhadap Injil yang berpusat pada pelayanan Yesus Kristus, yang mengungkapkan pemerintahan yang adil dan penuh kasih serta inklusif radikal Allah, menentang teologi kebencian dan eksklusif pada zamannya;
2. Mengadopsi pernyataan kebijakan yang mengecam Nasionalisme Agama, menegaskan hak-hak minoritas agama di seluruh dunia, dan memperkuat bahwa kesetiaan gereja adalah kepada Allah semata, bukan kepada ideologi atau kekuasaan politik mana pun;
3. Memfasilitasi pertukaran di antara gereja-gereja anggota mengenai sumber daya, teologi, dan praktik yang membantu gereja-gereja untuk menentang dan melawan penggambaran iman Kristen sebagai iman yang penuh kebencian, eksklusif, ketidakadilan, dan kekerasan;
4. Berkolaborasi dengan persekutuan global lainnya (seperti Sidang Gereja-Gereja Sedunia), tradisi keagamaan yang berbeda, dan mitra lain yang diberikan Tuhan untuk meningkatkan kesadaran tentang Nasionalisme Agama dan beradvokasi di PBB.

Kecenderungan otoriter di Eropa - Bersaksi untuk Demokrasi dan Martabat Manusia

Mengakui tanggung jawab semua orang untuk berpartisipasi dalam berbagi kebaikan bersama masyarakat mereka, WCRC, dipandu oleh Konfesi Accra dan panggilannya untuk mengenali tanda-tanda zaman, menyebutkan penyalahgunaan kekuasaan dan privilese sebagai ancaman terhadap keadilan, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Dunia saat ini semakin terpecah oleh ketakutan, ketidakpercayaan, dan kebencian, dan meningkatnya otoritarianisme memperparah perpecahan ini. Ketika institusi demokratis goyah atau dibiarkan melemah, kekosongan terbentuk yang memudahkan otoritarianisme, totalitarianisme, dan otokrasi untuk berkembang. Sejarah telah menunjukkan bahwa ketika prinsip-prinsip demokratis diabaikan, rezim penindas naik ke kekuasaan, menekan kebebasan, dan menghambat kemajuan. Pemimpin politik di berbagai belahan dunia semakin melemahkan prinsip-prinsip inti demokrasi, seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi, demi retorika populis, praktik otoriter, dan konsolidasi kekuasaan. Georgia menjadi contoh bagaimana kekuatan politik dapat memanipulasi perpecahan sosial untuk mengonsolidasikan kekuasaan, seringkali menargetkan minoritas agama, etnis, dan seksual. Kelompok-kelompok ini, termasuk anggota komunitas LGBTQ+, Muslim, dan berbagai minoritas etno-religius, sangat rentan terhadap marginalisasi. Tren ini tidak terbatas pada satu negara saja; ini adalah masalah global yang mempengaruhi baik demokrasi yang sedang berkembang maupun yang sudah mapan.

Sidang Raya dipanggil untuk:

1. Melakukan refleksi teologis tentang meningkatnya otoritarianisme dan dampaknya terhadap keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.
2. Menganalisis peran Gereja — baik keterlibatan maupun perlawanan — dalam pertumbuhan nasionalisme dan otokrasi, mencari komitmen baru terhadap kebenaran, kerendahan hati, dan kebebasan dalam Kristus.

Militerisasi - Bersaksi untuk Perdamaian di Dunia yang Penuh Kekerasan

Di dunia yang saling terhubung saat ini, konflik di satu wilayah memiliki dampak mendalam pada komunitas global, memengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan politik. Bagi negara-negara berkembang seperti Trinidad dan Tobago, gangguan pada rantai pasokan pangan global akibat konflik memiliki dampak jangka panjang pada keamanan pangan, mata pencaharian, dan kesehatan masyarakat. Dengan bertahan dalam kesaksian, pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Sebagai lanjutan dari kesaksian konfesional WCRC melawan kekuasaan kerajaan dan sistem yang membunuh, kami mengenali militerisasi sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Allah tentang kehidupan, keadilan, dan damai. Militerisasi mencerminkan janji palsu kekaisaran tentang perdamaian melalui dominasi, suatu realitas yang diungkapkan oleh Konfesi Accra sebagai penyembahan berhala yang menafikan kedaulatan Allah. Gereja dipanggil untuk menunjukkan solidaritas dan kesaksian yang berharga—menolak keamanan palsu senjata, berdiri bersama mereka yang hidup dan tanahnya hancur oleh perang sementara agen-agen militerisasi mengeksploitasi secara ekonomi. Militerisasi juga beririsan dengan berbagai isu lain.

Akibat militerisasi, banyak orang kehilangan nyawa secara brutal, banyak yang melarikan diri dari negara mereka mencari suaka di tempat lain, sementara jutaan lainnya menjadi pengungsi internal. Dampak militerisasi secara tidak proporsional merugikan perempuan dan anak-anak, seringkali dengan cara yang menyakitkan, membungkam suara mereka dan menolak martabat mereka. Sebuah generasi telah bertumbuh dengan hanya mengenal kekerasan dan ketidakamanan, membentuk pandangan dunia dan kepemimpinan masa depan mereka.

Sidang Raya dipanggil untuk:

1. Berpartisipasi aktif dalam upaya global untuk perdamaian, mendukung inisiatif yang mempromosikan penyelesaian konflik tanpa kekerasan, pembangunan perdamaian, dan keadilan.
2. Mendorong gereja-gereja anggota untuk mendirikan dan mendukung pelayanan khusus yang dirancang untuk membantu orang-orang yang terpaksa pindah dan pengungsi.
3. Mendorong gereja-gereja anggota untuk berkolaborasi dengan mitra lokal dan global dalam menangani ketidakamanan pangan yang semakin parah akibat konflik internasional.
4. Bekerja untuk mendirikan program-program yang mendorong kohesi sosial dan memerangi xenofobia di komunitas yang terkena dampak migrasi.
5. Bekerja sama dengan organisasi ekologi dan kemanusiaan untuk mengadvokasi perlindungan lingkungan di zona konflik dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dalam upaya pemulihan pasca-perang.
6. Mengundang gereja-gereja anggota untuk mendesak pemerintah mereka untuk mengurangi pengeluaran militer.

Seruan untuk Perdamaian dan Keadilan di Asia (Timur) - Bertekun dalam Kesaksian

Sesuai dengan seruan Persidangan untuk bertekun dalam kesaksian akan perdamaian, rekonsiliasi, dan penyembuhan ciptaan, komite menerima beberapa usulan yang menanggapi situasi darurat di seluruh Asia Timur. Seruan-seruan ini memiliki keinginan bersama akan keadilan dan komitmen untuk mengubah struktur kekerasan melalui iman dan solidaritas.

Semenanjung Korea - Ziarah Perdamaian dan Reunifikasi

Pada tahun 2025, tahun ke-80 pembagian dan tahun ke-72 sejak penandatanganan perjanjian gencatan senjata, Semenanjung Korea tetap menjadi salah satu titik panas paling sensitif dalam lanskap perdamaian global dan pusat ketegangan militer di Asia Timur Laut. Dinamika tumpang tindih antara persaingan strategis AS-China, kerja sama keamanan yang diperkuat antara Korea Utara, Rusia, dan China, serta aliansi militer trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang telah menciptakan atmosfer di mana logika pencegahan mendominasi bahasa dialog. Dalam konteks ini, upaya rekonsiliasi di Semenanjung Korea bukan hanya masalah regional, tetapi perjalanan spiritual global yang memiliki potensi untuk mengubah struktur kekerasan menjadi jalan menuju perdamaian.

World Communion of Reformed Churches (WCRC), sebagai komunitas ekumenis yang dipanggil untuk melayani kehidupan, keadilan, dan damai sejahtera Allah, menyadari situasi saat ini di Semenanjung Korea melalui lensa tanggung jawab moral global. Kami menegaskan bahwa pemulihan hubungan dan pemulihan saluran kepercayaan merupakan inti dari perjalanan damai bersama kita. Kami mengingat momen pada Sidang Raya WCRC 2017 di Leipzig, ketika perwakilan gereja dari Korea Selatan dan Korea Utara berkumpul dalam makan bersama agape. Pertemuan itu menunjukkan bahwa meskipun dalam konteks perpecahan, gereja tetap satu tubuh yang dipanggil untuk bersekutu. Dengan semangat ini, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mendampingi gereja-gereja di Semenanjung Korea agar ruang-ruang pertemuan dan dialog dapat dibuka kembali.

Setelah pemberlakuan hukum darurat yang tidak sah pada 2024, komunitas keagamaan dan masyarakat sipil di Korea bangkit untuk mempertahankan demokrasi dan martabat manusia. Seiring munculnya peluang rapuh untuk keterlibatan kemanusiaan dan berbasis keagamaan, gereja global dipanggil untuk mendampingi rakyat Korea dalam menumbuhkan rekonsiliasi di tengah luka perang yang masih terbuka.

Rekonsiliasi dan perdamaian di Semenanjung Korea, oleh karena itu, merupakan pengakuan iman bagi gereja global. Kami berdoa agar ketidakpercayaan dapat digantikan oleh saling menghormati, dan agar logika keamanan dapat diubah menjadi praktik keadilan yang menghargai kehidupan. WCRC menegaskan bahwa kami adalah teman seperjalanan dalam perjalanan ini, dan kami menaruh harapan bahwa Semenanjung Korea dan wilayah Asia Timur Laut yang lebih luas dapat menjadi tanah di mana damai Allah berakar.

Damai Regional dan Solidaritas dengan Taiwan

Taiwan, seperti Korea dan Jepang—negara-negara yang terletak di Asia Timur Laut—secara mendalam merasakan kecemasan dan guncangan yang disebabkan oleh ketegangan global yang terus berlanjut. Sebagai bagian integral dari Asia dan anggota keluarga ekumenis, Taiwan layak mendapatkan persahabatan, solidaritas, dan doa dari gereja-gereja di seluruh dunia. Bersama dengan Gereja Presbiterian di Taiwan (PCT), kami mengundang komunitas ekumenis untuk terus berjalan bersama kami dalam misi bersama damai dan keadilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan terjebak di tengah ketegangan yang semakin meningkat antara dua kekuatan besar. Masa depan Taiwan dan keamanan rakyatnya tetap tidak pasti. Hampir setiap hari, pesawat militer China melintasi wilayah udara Taiwan, dan latihan militer berskala besar yang sering dilakukan telah menempatkan kehidupan dan keamanan rakyat Taiwan dalam ancaman konstan. Kondisi ini memaksa rakyat Taiwan untuk hidup di bawah bayang-bayang kemungkinan konflik militer. Selain itu, Taiwan terus menghadapi hambatan dan penindasan dari negara tetangga di seberang Selat Taiwan, terutama saat berpartisipasi dalam pertemuan atau acara internasional. Interferensi yang terus-menerus ini mengisolasi Taiwan dari komunitas internasional dan merusak prinsip kesetaraan dan saling menghormati.

Selama puluhan tahun, Gereja Presbiterian di Taiwan telah menjadi saksi setia akan iman, keadilan, dan perdamaian di pulau ini. PCT secara konsisten berdiri bersama yang tertindas, berbicara kebenaran kepada kekuasaan, dan mewakili harapan pembebasan dan penentuan nasib sendiri. Mengingat tantangan saat ini, kami menyerukan kepada komunitas ekumenis global untuk bersolidaritas dengan rakyat dan gereja-gereja Taiwan—untuk mengambil tindakan konkret dan terkoordinasi demi perdamaian di Asia Timur Laut.

Ketidamdamaian di Filipina

Situasi di Filipina ditandai oleh ketidamdamaian—suatu keadaan ketidakadilan yang meluas, berakar pada penindasan historis, ketidaksetaraan ekonomi, dan korupsi politik. Pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan sistemik, dan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan neoliberal dan asing—terutama dari Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Amerika Serikat—terus mengeksploitasi dan meminggirkan rakyat Filipina. Konflik bersenjata selama puluhan tahun mencerminkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mendalam yang tidak dapat diselesaikan melalui cara militer. Meskipun telah ada negosiasi damai antara Pemerintah Republik Filipina (GRP) dan Front Demokratik Nasional Filipina (NDFP), pemerintah gagal menepati komitmennya, malah beralih ke penandaan merah, represi, dan kekerasan.

Dalam iklim ketegangan politik dan pengaruh militer asing, terutama di bawah Strategi Indo-Pasifik AS dan konflik regional yang semakin meningkat dengan China, penderitaan rakyat Filipina semakin parah. Gereja Kristen Persatuan Filipina (UCCP) mendesak komunitas ekumenis global untuk bersolidaritas dengan rakyat Filipina dengan mengaktifkan kembali Forum Ekumenis Global untuk Perdamaian yang Adil di Filipina. Mereka menyerukan kepada WCRC dan mitra lainnya untuk mendukung perundingan damai, mengancam pelanggaran hak asasi

manusia, menentang militerisasi, dan mendampingi gereja-gereja dan komunitas dalam perjuangan mereka untuk keadilan, kedaulatan, dan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Sidang Raya diminta untuk:

Korea

1. Berdoa dan bersuara agar pemerintah memilih de-eskalasi dan membuka kembali dialog untuk meredakan ketegangan militer di Korea dan Asia Timur Laut.
2. Mengingat Minggu Doa untuk Reunifikasi Damai Korea (Minggu sebelum 15 Agustus) dan mendorong semua gereja WCRC untuk ikut serta menggunakan materi doa bersama dalam konteks ibadah mereka.
3. Mendukung dan memperkuat Forum Ekumenis untuk Perdamaian, Reunifikasi, dan Pembangunan Semenanjung Korea (EFK) bersama mitra WCRC untuk membuka kembali ruang pertemuan dan dialog teologis di antara gereja-gereja di Korea Utara dan Selatan serta wilayah tersebut.
4. Mendorong pengecualian kemanusiaan terhadap sanksi dan pembatasan perjalanan yang menghalangi keterlibatan berbasis keyakinan dan layanan penuh kasih.
5. Berpartisipasi dalam Perjalanan Damai Korea melalui pertukaran kaum muda, pendidikan perdamaian, jaringan doa, dan lingkaran belajar ekumenis yang menumbuhkan komunitas perdamaian dalam tindakan.
6. Mendorong WCRC untuk mengirim delegasi perdamaian ekumenis atau Ziarah Perdamaian ke Korea dan Zona Demiliterisasi (DMZ) sebagai tanda solidaritas global yang terlihat dan kesaksian melawan perang.

Taiwan

1. Bergabunglah dengan PCT dan rakyat Taiwan melalui platform Forum Ekumenis Taiwan (TEF) untuk meningkatkan visibilitas internasional Taiwan dan memperkuat kesaksian bersama kami untuk perdamaian dan keadilan di kawasan ini.

Filipina

1. Berdiri dalam solidaritas aktif bersama rakyat Filipina dalam perjuangan mereka untuk penentuan nasib sendiri yang adil dan perdamaian yang berkelanjutan yang mengatasi akar ketidakadilan dengan **menyerukan dilanjutkannya negosiasi perdamaian GRP-NDFP yang mengatasi akar UNPEACE**, membantu menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional melalui kunjungan pastoral, serta mengungkap dan memperdalam pemahaman global tentang akar dan manifestasi kekerasan sistemik dan penindasan di Filipina, serta hubungannya dengan militerisasi global dan ketidakstabilan regional di Asia Pasifik.
2. Membantu mendirikan GEF-PH dalam konteks gerakan global solidaritas mutual, menghidupkan kembali dukungan moral, material, dan bentuk dukungan lainnya bagi gereja-gereja Filipina dalam pekerjaan untuk perdamaian berdasarkan keadilan.

Pernyataan Gereja Presbyterian Myanmar

Persidangan juga menerima pengajuan dari Gereja Presbiterian Myanmar, yang menyaksikan ketekunan gereja di bawah penindasan dan konflik.

Sejak pandemi COVID-19 dan kudeta militer pada 2021, situasi di Myanmar semakin memburuk. Setiap negara bagian telah menjadi medan perang antara tentara dan kelompok revolusioner.

Sistem kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan transportasi telah runtuh. Strategi "Empat Pemotongan" tentara telah berdampak menghancurkan (kerugian nyawa dan pengungsian) bagi warga sipil. Undang-undang wajib militer paksa mendorong banyak pemuda untuk melarikan diri dari negara, menjadikan mereka rentan terhadap perdagangan manusia dan perbudakan modern. Tujuh dari sepuluh Sinode PCM berada di zona konflik di mana sekolah-sekolah pemerintah tidak berfungsi. Menambah penderitaan ini, gempa bumi dahsyat pada Maret 2025 melanda Myanmar Tengah. Kami juga sedih atas konflik di antara saudara-saudara kami di Negara Bagian Chin. Gereja-gereja berusaha melalui dialog, perawatan, dan doa untuk perdamaian bagi rakyat dan bangsa kami.

Sidang Raya diminta untuk:

1. Terus berdoa untuk perdamaian, keadilan, dan penyembuhan di Myanmar.
2. Berdiri bersama rakyat Myanmar dan semua yang menderita di bawah penindasan.
3. Mendukung upaya gereja dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan perdamaian sebagai tindakan iman dan kasih sayang.

Venezuela dan Karibia - Wilayah Perdamaian, Bukan Perang

Gereja-gereja anggota di Karibia mengekspresikan keprihatinan atas meningkatnya militerisasi dan intervensi asing di wilayah tersebut, terutama terhadap Venezuela. Penempatan pasukan laut AS dengan dalih operasi anti-narkotika mengancam stabilitas regional dan membahayakan mata pencaharian, terutama di kalangan nelayan. Tindakan AS ini telah menyebabkan peningkatan ketegangan regional dan militerisasi, menciptakan risiko tinggi eskalasi konflik geopolitik.

Saat ini, kawasan Karibia dengan cepat menjadi lokasi ketegangan dan cenderung menuju perang, terutama dengan penempatan kehadiran militer AS. Tindakan imperialis yang tidak adil dari intervensi maritim AS terhadap Venezuela, dengan dalih perang melawan perdagangan narkoba, menimbulkan ancaman serius bagi negara-negara Karibia, terutama bagi salah satu populasi paling rentan mereka, yaitu nelayan. Sebagai sumber penghasilan utama, kehidupan dan mata pencaharian mereka terancam dengan kemungkinan mereka dibunuh dan dituduh secara salah sebagai "teroris narkoba", serta kapal-kapal mereka ditargetkan secara salah dan ilegal oleh serangan militer AS atau tindakan penangkapan. Wilayah Karibia dan Amerika Latin harus tetap menjadi zona perdamaian.

Sidang Raya dipanggil untuk:

1. Menolak agresi yang dipimpin AS terhadap Venezuela dan rakyatnya, termasuk represi dan stigmatisasi yang ditargetkan. Mengorganisir dan mempromosikan kampanye global dan regional untuk mendesak penghapusan segera blokade ekonomi dan politik terhadap Venezuela.
2. Menyerukan penghentian aksi militer ilegal terhadap kapal-kapal Venezuela di Laut Karibia.
3. Menyerukan penghentian campur tangan AS dalam urusan politik internal Venezuela.
4. Menyerukan kepada PBB dan organisasi multilateral untuk menggalang upaya diplomatik guna mencari solusi non-militer terhadap polarisasi dan situasi hak asasi manusia, sehingga demokrasi penuh dan penentuan nasib sendiri dapat terwujud tanpa campur tangan asing.

5. Melakukan kunjungan solidaritas pastoral ke gereja anggota kami di Venezuela bersama AIPRAL dan aktor ekumenis lainnya yang bersedia.

Haiti - Seruan untuk Perdamaian, Keadilan, dan Pemulihan

Haiti menghadapi krisis kemanusiaan dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan kekhawatiran yang semakin meningkat terkait hilangnya nyawa dan pelanggaran hak asasi manusia. Negara-negara seperti Amerika Serikat secara tidak langsung berkontribusi pada krisis ini melalui warisan kolonialisme, masalah imigrasi yang berkelanjutan, dan perdagangan senjata, yang memasok senjata kepada geng-geng, sehingga mengganggu stabilitas negara. Dengan sekitar 750.000 imigran Haiti yang tinggal di Amerika Serikat, banyak di antaranya adalah tetangga dan anggota gereja lokal kami, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab historis atas ketidakstabilan politik dan ekonomi yang tertinggal di Haiti. Selain itu, banyak senjata yang membanjiri Haiti di tengah kekerasan geng yang terus berlanjut telah diselundupkan dari Amerika Serikat. Haiti tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia, dengan lebih dari 59% penduduknya hidup dalam kemiskinan.

Ini adalah masalah global dengan dampak bagi orang-orang keturunan Afrika di Amerika, termasuk Haiti dan Haiti-Amerika. Haiti adalah satu-satunya negara di Karibia yang mencapai pembebasan diri dari perbudakan dan kolonialisme Perancis. Sejak berkembang dari koloni dengan penduduk Afrika yang diperbudak menjadi republik pasca-kolonial yang merdeka, Haiti dan rakyatnya telah mengalami pembalasan dan hukuman dari Perancis dan negara-negara kolonial yang mendukungnya. Haiti terus dihukum sebagai simbol perlawanan anti-kolonial kulit hitam. Mengingat masalah yang terus berlanjut terkait warisan perdagangan budak transatlantik, ganti rugi, pasca-kolonialisme, rasisme kontemporer, dan tantangan migrasi global, nasib Haiti tetap menjadi isu internasional yang penting.

Sidang Raya ke-27

1. didesak untuk mengadopsi pernyataan yang menyerukan perdamaian, keadilan, dan pemulihan bagi Haiti.

Seruan Solidaritas dari Gereja-Gereja di Jerman: Kesaksian dalam Konteks yang Berubah

Gereja-gereja anggota di Jerman mengajukan refleksi tentang lanskap keagamaan Eropa yang berubah dengan cepat, di mana untuk pertama kalinya, orang-orang tanpa afiliasi keagamaan kini melebihi jumlah mereka yang secara formal tergabung dalam gereja. Perubahan mendalam ini menantang model-model tradisional pelayanan, pengikut Kristus, dan komunitas.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Federal Jerman, orang-orang tanpa afiliasi agama membentuk proporsi populasi yang lebih besar daripada Katolik dan Protestan secara bersama-sama. Menurut data, terdapat sekitar 39 juta orang tanpa afiliasi agama (46,8% dari total populasi dibandingkan 22% pada 1990) dan sekitar 38 juta (21,5% Protestan [36,9% pada 1990], 23,7% Katolik [35,8% pada tahun 1990]) yang masih menjadi anggota salah satu dari dua gereja besar tersebut.

Pada akhir tahun ini, jumlah orang tanpa afiliasi agama akan melebihi jumlah anggota gereja Kristen secara keseluruhan. Penurunan ini juga berdampak kuat pada jemaat dan gereja Reformed kami. Namun, kami menyadari bahwa kami masih berada dalam situasi yang sangat menguntungkan, dengan struktur yang kuat, sumber daya, dan kebebasan, dibandingkan dengan banyak gereja di seluruh dunia, yang memungkinkan kami membentuk pelayanan kami.

Meskipun demikian, kami menyadari bahwa hal ini juga berarti bahwa sumber daya keuangan kami akan semakin berkurang di masa depan.

Ini adalah situasi yang berubah dengan cepat yang dihadapi oleh gereja-gereja. Injil sulit didengar di dunia yang bising ini. Kami mencari cara untuk menjangkau anggota yang tetap setia dan anggota baru, membangun komunitas yang memiliki ruang bagi firman Allah untuk didengar dan menggerakkan hati. Kami percaya bahwa kami dapat belajar banyak dari saudara-saudari kita dalam keluarga Reformed.

Sidang Raya diminta

1. untuk menjelajahi sumber daya teologis dan pendidikan yang ada di gereja-gereja anggota untuk mendukung gereja-gereja yang menghadapi penurunan jumlah anggota dan perubahan konteks sosial.
2. Untuk berbagi praktik terbaik tentang strategi untuk membangkitkan antusiasme yang lebih besar terhadap firman Allah.

Madagaskar, salah satu negara termiskin di dunia, telah mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem dari 69% pada 2021 menjadi lebih dari 80% pada 2025. Pada 25 September, protes massal pemuda meletus di beberapa kota, menuntut kebutuhan dasar seperti air dan listrik. Gerakan ini, yang mencerminkan keputusasaan sosial yang mendalam dan kurangnya peluang, ditanggapi dengan represi kekerasan oleh otoritas, mengakibatkan kematian, penangkapan, dan kerusakan. Sebagai respons, beberapa tentara berpihak pada para demonstran. Setelah presiden melarikan diri ke luar negeri dan ketidakhadiran pemimpin konstitusional lainnya, Mahkamah Konstitusi Agung menyatakan jabatan presiden kosong dan secara sementara menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada salah satu tentara yang terlibat, dengan menekankan bahwa situasi ini tidak boleh dianggap sebagai kudeta.

Kami meminta WCRC:

- Untuk mendengarkan jeritan rakyat Madagaskar, terutama generasi muda yang telah mengungkapkan keputusasaan mereka terhadap situasi krisis di negara mereka dan keinginan mereka untuk membangun masa depan yang lebih adil. Untuk mendengarkan jeritan ini, yang telah dibungkam dan kadang-kadang disalahartikan oleh beberapa media internasional.
- Untuk berdoa bagi rakyat Madagaskar dan Generasi Z, yang memimpin gerakan rakyat yang membawa perubahan bersejarah ini.
- Untuk mendoakan Madagaskar, pemimpin barunya, termasuk Kolonel Michael RANDRIANIRINA, yang ditunjuk oleh HCC sebagai kepala negara untuk transisi, dan mendoakan agar tim di sekitarnya memiliki keberanian untuk melakukan perubahan agar tidak mengecewakan rakyat Madagaskar.
- Berdoa untuk pemulihan negara agar terjadi pemutusan yang nyata dengan korupsi dan penyalahgunaan dana yang telah menyebabkan kemiskinan penduduk meskipun pulau besar ini memiliki kekayaan yang luar biasa.
- Berdoa agar rakyat Madagaskar dapat mempertahankan persatuan mereka dalam tradisi "Fihavanana"

- Serukan kepada berbagai badan internasional agar tidak menghentikan bantuan dan pendanaan ke Madagaskar, karena hal ini akan berdampak bencana bagi penduduk.

Kesimpulan — Bertekun dalam Iman, Keadilan, dan Pengharapan

Melalui berbagai pengajuan yang seringkali saling terkait ini, gereja-gereja dalam Persekutuan telah bersaksi tentang jeritan dan harapan rakyat dan wilayah mereka. Dalam menerima masukan-masukan ini, Sidang Raya diundang untuk mendeteksi bagaimana Roh Kudus memanggil kita untuk mengaku, bersaksi, dan diperbarui—berpartisipasi dalam karya pembaruan Allah akan keadilan, damai, dan penyembuhan ciptaan.